

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Serius Tarik Anggaran Formula E

JAKARTA-Komisi C DPRD DKI menjadwalkan rapat dengan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (11/5/2020). Anggota Komisi C, S. Andyka, mengatakan rapat dengan BUMD bakal membahas soal realokasi anggaran yang tidak berjalan atau terserap tahun ini.

"Anggaran itu akan digunakan untuk penanggulangan Covid-19 di DKI," kata Andyka. Menurutnya, dalam hitungan komisi, hasil dari realokasi anggaran BUMD DKI bisa dimasukkan ke anggaran belanja tidak terduga lebih dari Rp1 triliun untuk penanggulangan wabah Covid-19. Salah satu realokasi anggaran bakal diambil dari anggaran penyelenggaraan Formula E.

"Anggaran Formula E akan direalokasi Rp207 miliar untuk menanggulangi Covid-19. Anggaran PDAM juga akan kami alihkan," ujarnya. Selain itu, pihaknya juga bakal meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk memajukan pemberian dividen BUMD pada bulan ini. Dana dividen nantinya bakal dimanfaatkan untuk anggaran program Kartu Jakarta Pintar.

"Dari dividen BUMD ada sekitar Rp750 miliar," ungkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata penambahan kasus positif hari ini, Senin (11/5/2020), terus melambat. Namun demikian, volume orang dalam pemantauan (ODP) kembali berakselerasi secara mingguan. Kasus positif Covid-19 hari ini bertambah 55 kasus atau naik 1,07 persen dari hari sebelumnya menjadi 5.195 kasus. Dari kasus



Anggaran Formula E akan direalokasi Rp207 miliar untuk menanggulangi Covid-19."

S. Andyka, Anggota Komisi C DPRD DKI

positif tersebut, sebanyak 2.258 orang dirawat di rumah sakit, sementara itu 1.648 orang melakukan isolasi mandiri.

Volume orang yang dirawat pada hari ini berkurang 102 pasien atau turun 4,32 persen dari hari sebelumnya. Penurunan pasien rawat pada hari ini merupakan penurunan terbesar selama 30 hari terakhir.

Biaya Formula E

Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali biaya komitmen yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO) sebesar Rp560 miliar.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, mengatakan biaya komitmen sebesar Rp560 miliar yang telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E Operations Limited (FEO) bisa digunakan untuk bantuan sembako bagi 3,7 juta warga Jakarta yang terdampak Covid-19.

Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp360 miliar dilaku-

kan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

Menurut dia, Gubernur Anies harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19. "Sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony.

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020. Karena itu, menurutnya, terdapat alasan yang kuat untuk meminta pengembalian uang.

"Kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausul force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini," ujar Anthony.

Dirinya menegaskan, Pemprov



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Serius Tarik Anggaran Formula E

DKI harus segera bertindak karena di dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

"Jika Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. Saya belum melihat Pemprov DKI melakukan pemberitahuan force majeure. Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari," ujar Anthony.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 1 bulan hingga 22 Mei 2020. Anthony menilai keputusan tersebut akan menambah jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial.

"Karena PSBB diperpanjang, maka ratusan ribu atau bahkan jutaan warga bisa terkena PHK atau penghasilannya berkurang, sehingga semakin banyak yang butuh bantuan. Nilai per paket bantuan sosial adalah Rp150 ribu. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Rp560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta keluarga," katanya.

Pada 1 Mei 2020, Gubernur Anies Baswedan meluncurkan Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Tujuannya agar masyarakat terlibat memberikan bantuan sosial. Anthony memandang program tersebut serupa

dengan crowdfunding.

"Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos, tapi Pak Gubernur tidak mau mengusahakan uang rakyat ratusan miliar commitment fee didapatkan kembali dari acara yang batal dan tidak diperlukan," tegasnya.

Tuntas Bulan Ini

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik, mengatakan DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada bulan ini akan menuntaskan pembahasan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan memparipurnakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2019.

Taufik mengatakan dua kegiatan tersebut sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta untuk dimulai pada Senin (11/5/2020) secara maraton. "Jadi, harus kita selesaikan bulan (Mei) ini," ujar Taufik.

Pada Senin (11/5/2020) ini, jelas Taufik, pihaknya melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas terlebih dahulu penyesuaian postur APBD DKI tahun anggaran 2020 yang terimbas pandemi virus Corona (Covid-19).

Kemudian, pembahasan LKPJ Peng-

gunaan APBD 2019 akan dilakukan secara bertahap melalui penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam rapat paripurn yang dijadwalkan hari ini Selasa (12/5/2020). Lalu, hasil penyampaian pidato Gubernur akan ditindaklanjuti di masing-masing Komisi bersama SKPD mitra kerja selama dua hari, Rabu (13/4/2020) hingga Kamis (14/5/2020).

Kemudian, penyampaian catatan atas hasil pembahasan komisi-komisi terhadap pembahasan LKPJ Penggunaan APBD DKI 2019 akan disampaikan dalam rapat Badan Anggaran yang digelar pada Jumat (15/5/2020). Selanjutnya hasil pembahasan Banggar DPRD DKI atas LKPJ Penggunaan APBD 2019 yang sebelumnya telah dibahas dalam komisi-komisi akan dilakukan penelitian akhir dan persetujuan terhadap rancangan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Penggunaan APBD 2019 dilakukan pada Senin (18/5/2020) pekan berikutnya.

Taufik menilai, seluruh agenda pembahasan perlu mendapatkan porsi yang komprehensif dari masing-masing komisi, mengingat adanya tanggung jawab legislatif yang merupakan mitra kerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Karena keduanya penting pertama mengenai pergeseran anggaran ini berdasarkan Peraturan Presiden seluruh anggaran harus dikomunikasikan di rapat Banggar, kemudian LKPJ yang menyangkut performance Pemda DKI, jadi keduanya ini penting," tandasnya. (dni)